

DIGITALISASI BIROKRASI: EFISIENSI PELAYANAN DI DISDUKCAPIL SINJAI

Salman

Ilmu Sosial Ilmu Politik Dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, Indonesia

Email: salmanimm45@gmail.com

Abstract. *This study examines the utilization of information technology in bureaucratic reform to enhance government efficiency at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) in Sinjai Regency. Using a quantitative approach, the research analyzes the impact of information technology adoption on bureaucratic efficiency, the challenges, and the benefits of its implementation. The findings indicate that information technology, such as the Centralized Population Administration Information System (SIAK) and Digital Population Identity (IKD), has significantly improved the efficiency, transparency, and accessibility of public services. However, key challenges, including infrastructure limitations, low digital literacy, and resistance to change, hinder the optimal use of technology. The study recommends improving staff training, strengthening technological infrastructure, and conducting public outreach to support sustainable digital transformation.*

Keywords: *information technology, bureaucratic reform, government efficiency.*

Abstrak. Penelitian ini membahas Digitalisasi Birokrasi dalam Hal Efisiensi pelayanan disdukcapil sinjai. Dengan mengadopsi pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengkaji pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap efisiensi birokrasi, tantangan, dan manfaat penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik. Namun, beberapa tantangan utama, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan, masih menjadi hambatan dalam optimalisasi teknologi. Rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan pelatihan pegawai, penguatan infrastruktur teknologi, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan.

Kata Kunci: teknologi informasi, reformasi birokrasi, efisiensi pemerintahan.

Received Oct 01, 2024; Revised Oct 28, 2024; Accepted Dec 02, 2024

**Salman, e-mail address: salmanimm45@gmail.com*

PENDAHULUAN

Dalam dinamika sistem pemerintahan, administrasi publik berperan sebagai tulang punggung dalam menjalankan fungsi pemerintahan seperti memberikan pelayanan publik, melaksanakan kebijakan, dan mengelola sumber daya publik. Efisiensi birokrat dalam administrasi publik merupakan elemen penting yang memungkinkan pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kebutuhan akan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif membuat fokus pada efisiensi birokrasi menjadi semakin penting (Din El Hakim Malik et al., 2023).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai merupakan salah satu organisasi yang merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sinjai yang mempunyai misi utama menyelenggarakan urusan politik di wilayah penduduk berdasarkan asas otonomi dan dukungan penyediaan jasa manajemen. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu wadah atau sarana kerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama, yang disatukan dalam suatu hubungan yang tertib, berdaya guna, dan sukses untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan memerlukan keahlian dan kinerja yang maksimal (Nanggung, 2020).

Pelaksanaan reformasi birokrasi akan dilakukan melalui pendekatan manajemen birokrasi modern yang mengintegrasikan teknologi digital dan prinsip agile governance untuk menjadikan pelayanan publik lebih efisien, transparan, dan responsif. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada seluruh aspek birokrasi, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Rahmadany & Rahmadany, 2024).

Disdukcapil Sinjai telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Terpusat (SIAM) untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Hal ini merupakan langkah penting dalam modernisasi pelayanan publik, dan penelitian lebih lanjut menarik untuk dilakukan. Pemanfaatan teknologi informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sinjai memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi birokrasi pemerintahan. Salah satu langkah penting adalah transisi dari Sistem Informasi Pengelolaan Kependudukan Terdistribusi (SIAM). Ke SIAM pusat. Dengan menerapkan SIAM terpusat, Kantor Disdukcapil Sinjai kini dapat menghubungkan seluruh layanan pengelolaan kependudukan secara *online* dengan sistem terpadu nasional (*Disdukcapil Sinjai Mulai Terapkan SIAM Terpusat, Upaya Permudah Urus Adminduk - Fajar Sulsul, n.d.*)

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, sektor publik menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu solusi dari permasalahan yang saat ini menjadi permasalahan besar adalah pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam reformasi birokrasi. Pemanfaatan teknologi informasi pada sektor publik seringkali menemui berbagai kendala. Infrastruktur teknologi yang tidak merata, rendahnya literasi digital di kalangan pegawai negeri, dan penolakan terhadap

perubahan merupakan beberapa tantangan utama yang menghambat optimalisasi birokrasi berbasis teknologi (Dwiyanto Indiahono, 2019). Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk mentransformasi sistem birokrasi seperti pada pemanfaatan teknologi informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kabupaten Sinjai yang menciptakan beberapa peluang penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Disdukcapil dapat mempercepat prosedur administrasi, meningkatkan transparansi, dan mudah diakses oleh masyarakat. menjadi sistem yang lebih modern.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintahan dan apa saja yang menjadi tantangan dan manfaat dari penerapan teknologi informasi dalam reformasi birokrasi di Kantor Disdukcapil Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan dalam reformasi birokrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sinjai. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan analisis yang objektif dan sistematis terhadap data numerik, sehingga dapat mengukur dampak implementasi teknologi informasi terhadap efisiensi birokrasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana teknologi informasi berkontribusi terhadap efisiensi birokrasi, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan manfaat yang dihadapi selama penerapannya.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sinjai, khususnya di Disdukcapil, yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan teknologi informasi secara signifikan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keunikan dan relevansi Disdukcapil Kabupaten Sinjai dalam mengimplementasikan sistem teknologi informasi untuk pelayanan publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang relevan bagi reformasi birokrasi di wilayah tersebut. Subjek penelitian melibatkan pegawai dan pimpinan Disdukcapil yang terlibat langsung dalam proses birokrasi. Fokus utama adalah pada individu yang berperan dalam pengelolaan data kependudukan dan pelayanan publik berbasis teknologi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengungkap pandangan, pengalaman, serta kendala yang mereka hadapi dalam penerapan teknologi informasi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara dilakukan dengan pegawai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi di Birokrasi Pemerintahan

Dalam pemanfaatan teknologi informasi telah mengubah cara kita bekerja, termasuk dalam pemerintahan. Pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti birokrasi, inefisiensi, dan rendahnya kualitas dan aksesibilitas. Sebaliknya kemunculan teknologi digital telah mendorong transformasi yang signifikan di berbagai bidang, termasuk layanan publik. Beberapa contoh inovasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia antara lain adalah tanda tangan elektronik, sistem perizinan online, Implementasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang merupakan bagian dari sistem *e-government* yang telah diterapkan pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Wahyuni, 2023). Dalam hal ini IKD dapat diartikan Identitas Anda dalam genggamannya dimana IKD ini adalah bentuk identitas kependudukan dalam bentuk digital yang diterbitkan oleh pemerintah. Dengan IKD, kita dapat mengakses berbagai layanan publik online tanpa perlu membawa dokumen fisik. Dua tahun terakhir disdukcapil kabupaten sinjai menerapkan IKD identitas kartu/kependudukan digital. Inovasi yang luar biasa.

Teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Perkembangan aplikasi teknologi informasi yang baik dapat membuat proses bisnis pemerintahan menjadi lebih cepat sehingga output yang dihasilkan lebih meningkat atau lebih produktif. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi pemerintahan, terutama melalui *e-government*, telah membawa perubahan signifikan (Dwiyanto Indiahono, 2019). Manfaatnya meliputi, Pelayanan yang lebih baik, Masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan 24/7 tanpa harus datang ke kantor, Peningkatan Transparansi, Efisiensi administrasi, Aksesibilitas dimana layanan online menjangkau daerah terpencil.

Infrastruktur teknologi informasi adalah suatu aset jangka panjang yang biasa disebut sebagai nilai untuk menghasilkan value dari suatu organisasi. Perkembangan infrastruktur teknologi informasi sangat mempengaruhi perubahan teknologi dalam organisasi dengan cara fleksibel teknologi informasi. Teknologi informasi ini dapat diterapkan dengan menggunakan rencana strategis dari suatu teknologi informasi. (Putri, 2022) DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai telah menerapkan teknologi dalam proses pelayanannya seperti IKD dan inovasi berupa PENCET WA SAJA. Inovasi ini memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan administrasi melalui aplikasi whatsapp.

Dampak Teknologi Informasi terhadap Efisiensi Birokrasi

Teknologi informasi memiliki kemampuan untuk mengotomatiskan berbagai proses administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengelolaan surat menyurat dan pengarsipan. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dapat berkurang secara signifikan. Penerapan teknologi informasi juga memberikan dampak langsung terhadap efisiensi, yang mencakup pengurangan waktu proses, peningkatan akurasi data, serta transparansi dalam administrasi. Dampak positif dirasakan pula disdukcapil Kabupaten Sinjai. Selain itu, Berbagai penelitian

telah menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki dampak positif terhadap efisiensi operasional dalam organisasi. Sebagai contoh mengungkapkan bahwa investasi dalam teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, serta memperbaiki kualitas layanan (Data, 2024). Penggunaan sistem manajemen dokumen memiliki kemampuan untuk mengurangi resiko kesalahan dalam pengelolaan data, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Hal ini terlihat dari peningkatan akurasi data yang diperoleh melalui sistem manajemen dokumen. Selain itu, teknologi informasi memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real-time, sehingga informasi yang disampaikan tidak hanya lebih akurat, tetapi juga tepat waktu. Aspek ini sangat krusial dalam situasi yang menuntut respons yang cepat dan akurat (Ayunda, 2025).

Dalam transparansi administrasi Implementasi e-government mampu meningkatkan transparansi dalam administrasi dengan menyediakan informasi dan layanan secara online kepada warga negara, pelaku bisnis, pegawai, dan unit pemerintahan. Dengan demikian, proses birokrasi dapat dipangkas, mempercepat langkah administratif, dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Gultom et al., 2024). Namun karena kemampuan teknologi masyarakat masih sangat minim terutama di daerah terpencil di Kabupaten Sinjai maka inovasi terus dirancang untuk diterapkan di disdukcapil berupa kerja sama dengan kepala desa sehingga mempermudah masyarakat dari segi pelayanan.

Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Teknologi Informasi

Tantangan dan hambatan dalam penerapan teknologi informasi mencakup berbagai aspek yang dapat menghambat keberhasilan implementasi. Salah satu kendala utama adalah infrastruktur yang tidak memadai, di mana banyak organisasi mungkin tidak memiliki jaringan internet yang stabil atau perangkat keras yang cukup baik. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi sering kali menjadi penghalang, karena tanpa keterampilan yang memadai, implementasi teknologi tidak dapat berjalan dengan efektif. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sinjai dengan biaya implementasi yang tinggi juga menjadi tantangan, di mana pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan untuk karyawan bisa menjadi mahal. Resistensi terhadap perubahan dari karyawan atau manajemen yang merasa nyaman dengan cara kerja lama dapat menghambat proses transformasi digital. Selain itu, keamanan dan privasi data menjadi perhatian penting, karena penerapan teknologi informasi meningkatkan risiko terkait perlindungan data sensitif. Keterbatasan pemahaman tentang teknologi informasi di kalangan individu atau organisasi juga dapat menghalangi pemanfaatan teknologi secara optimal. Regulasi dan kebijakan pemerintah atau kebijakan internal organisasi kadang-kadang dapat menjadi penghalang dalam penerapan teknologi informasi. Mengatasi tantangan dan hambatan ini sangat penting agar penerapan teknologi informasi dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Persepsi Pegawai dan Masyarakat

Penerapan transformasi digital dalam birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sinjai telah membawa dampak signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Salah satu aspek paling mencolok dari transformasi ini adalah perubahan cara penyimpanan dan pencarian data. Sebelumnya, petugas harus membuka lembaran kertas untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga berpotensi menyebabkan kesalahan. Kini, dengan sistem digital, data dapat diakses secara langsung melalui komputer, yang telah diinput sebelumnya. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pencarian data, tetapi juga mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Selain itu, penggunaan Inovasi Kinerja Digital (IKD) dalam Disdukcapil telah terbukti efektif dalam mengurangi antrian yang sering kali mencapai ratusan setiap harinya. Dengan bantuan aplikasi ini, waktu tunggu masyarakat berkurang secara signifikan, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Bapak Sekretaris Dinas menyatakan, “Dari sisi indeks efektif dan efisiensi, aplikasi ini sangat membantu dalam memperkecil antrian di Disdukcapil.” Pernyataan ini mencerminkan keberhasilan implementasi teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Meskipun demikian, inovasi dalam birokrasi pelayanan Disdukcapil Kabupaten Sinjai tidak berhenti di situ. Upaya terus-menerus dilakukan untuk memastikan kelancaran pelayanan. Namun, tantangan tetap ada. Keterbatasan peralatan komputer yang sudah tua menjadi salah satu penghambat utama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan anggaran yang memadai guna memperbarui peralatan tersebut agar dapat mendukung sistem digital yang lebih canggih.

Di samping itu, meskipun banyak karyawan yang telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru, sebagian dari mereka masih memerlukan pelatihan tambahan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem digital. Pelatihan ini sangat penting agar semua pegawai dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tidak hanya pegawai, masyarakat juga perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi. Saat ini, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mampu memanfaatkan layanan digital yang disediakan. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses layanan dengan mudah dan efektif.

Tantangan juga muncul dari persepsi masyarakat dan pegawai mengenai efektivitas sistem baru. Beberapa mungkin merasa skeptis terhadap perubahan yang terjadi dan lebih nyaman dengan cara-cara tradisional. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi semua kendala ini. Strategi tersebut harus mencakup komunikasi yang jelas mengenai manfaat transformasi digital serta mendengarkan masukan dari masyarakat dan pegawai untuk meningkatkan sistem yang

ada. Mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting agar transformasi digital dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Disdukcapil Kabupaten Sinjai dapat menjadi contoh dalam penerapan teknologi digital di birokrasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efisien, dan berkualitas.

KESIMPULAN

Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi pemerintahan, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sinjai, telah membawa perubahan signifikan dalam pelayanan publik. Inovasi seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan sistem perizinan online telah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam administrasi. Masyarakat kini dapat mengakses layanan secara lebih mudah dan cepat tanpa harus datang ke kantor, yang berdampak positif pada kualitas pelayanan. Namun, tantangan dalam penerapan teknologi informasi tetap ada, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, dan resistensi terhadap perubahan dari pegawai. Keterbatasan peralatan komputer dan kebutuhan pelatihan tambahan bagi pegawai dan masyarakat juga menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Pentingnya sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat menjadi langkah strategis untuk memastikan semua pihak dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Persepsi skeptis terhadap sistem baru juga harus diatasi melalui komunikasi yang jelas mengenai manfaat transformasi digital. Strategi yang tepat dan dukungan anggaran yang memadai, Disdukcapil Kabupaten Sinjai berpotensi menjadi contoh dalam penerapan teknologi digital di birokrasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efisien, dan berkualitas. Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan kinerja birokrasi tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

REFERENSI

- Busri, Ihyani Malik, & Nur Wahid. (2023). Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 85–119. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.134>
- Clr/Humas MENPANRB. (2019). *Mengawal Reformasi Birokrasi dengan Teknologi Informasi*. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/mengawal-reformasi-birokrasi-dengan-teknologi-informasi>
- Din El Hakim Malik, Aji Nurmanto, Jeihan Mahendra Putra, & Adha Agung Saputro. (2023). Analisis Efisiensi Birokrasi dalam Administrasi Publik: Tinjauan Terhadap Proses Pengambilan Keputusan. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 232–237. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.525>
- Disdukcapil Sinjai Mulai Terapkan SIAK Terpusat, Upaya Permudah Urus Adminduk - Fajar Sulsel*. (n.d.).
- Dwiyanto Indiahono. (2019). Peran Teknologi Informasi dalam Reformasi Birokrasi di Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 15(1), 23–35.

- Inovasi, J. S., & Bangka, K. (2023). *I NOVASI P ELAYANAN P UBLIK B ERBASIS E-*. 3(1), 21–30.
- Murtaho, M. A. (2024). *Peran Teknologi Informasi dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Era Digital di Indonesia*. 1(1), 12–23.
- Nanggung, U. A. (2020). *T e s i s kinerja pelayanan publik pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sinjai*.
- Rahmadany, A. F., & Rahmadany, A. F. (2024). *Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile government pada Reformasi Birokrasi 4 . 0*. 14(2), 195–209.
- Ritonga, A. E., Sinaga, K., & Saragi, S. (2023). Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pematangsiantar. *Publik Reform*, 10(1), 35–49. <https://doi.org/10.46576/jpr.v10i1.3453>
- Siregar, R. O., Nur, T., & Meigawati, D. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Kk) Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Jurnal Governansi*, 9(1), 61–70. <https://doi.org/10.30997/jgs.v9i1.5509>
- Sofianto, A. (2020). Services Innovation Based On Information Technology In Hospital As a Form Bureaucratic Reform. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 18(1), 81–102.
- Sukraaliawan, I. N., & Agustana, P. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng. *Locus*, 15(2), 91–106. <https://doi.org/10.37637/locus.v15i2.1489>
- Surokim, Yuliana Rakhmawati, Catur Suratnoaji, Muhtar Wahyudi, Tatag Handaka Bani Eka Dartiningsih, Dinara Maya Julijanti, Farida Nurul Rachmawati, Netty Diah Kurniasari, Dessy Trisilowaty, Nikmah Suryandari, H.Achmad Cholil, Dewi Quraisyin, Bambang Moert, A. C. (2016). *RISET KOMUNIKASI : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi* (Surokim (Ed.); Surokim).
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 13–23.
- Taufiq, M. I., Hoerudin, C. W., & Farida, A. S. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Administrasi Perkantoran pada Kantor Desa Cikalong Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 4(3), 103–117. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v4i3.20151>
- Utami, P. (2023). TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK: INOVASI DAN ADAPTASI MENUJU EFISIENSI DAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 6(2), 1–9. <https://doi.org/10.54783/japp.v6i2.726>